

JURNAL
IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN
BANTUL MENUJU PEMERINTAHAN DESA BERBASIS ELEKTRONIK
(E-DESA) DI DESA BANGUNJIWO



Disusun Oleh :

MUKHLIS

20100520055

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

2016

JURNAL
IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN
BANTUL MENUJU PEMERINTAHAN DESA BERBASIS ELEKTRONIK (E-DESA)

DI DESA BANGUNJIWO

MUKHLIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

ABSTRAK

Maksud dikeluarkan Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Dan Peraturan Bupati No 76 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Yakni untuk mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana teknologi komunikasi yang telah dimiliki pemerintah setempat. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada pemanfaatan TIK. Yang dapat mendorong percepatan gerak pembangunan daerah di segala bidang aspek kehidupan yang strategis, tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam rangka untuk mewujudkan potensi sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan pengetahuan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dengan melalui Pelaksanaa kegiatan Program menuju Pemerintahan Desa Berbasis Eletronik (e-Desa). Salah satunya Desa Bangunjiwo di Kecamatan kasihan, yang menjalankan program e-Desa. Dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Di lain pihak, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Pemerintah Kabupaten Bantul mulai mengembangkan konsep e-Government yang sudah berjalan sejak 2014. Pemanfaatan website desa ini untuk mendukung pelayanan publik di Desa dan untuk menampilkan potensi desa. dengan mengacu pada visi “Mewujudkan Bantul sebagai salah satu upaya menuju “Bantul Cyber City”. Dengan semangat itulah Kabupaten Bantul telah membangun infrastruktur jaringan online sampai ke tingkat desa. Dengan sarana infrastruktur yang telah tersedia dan permasalahan administrasi dan potensi desa yang perlu mendapatkan perhatian serius, dalam hal ini aplikasi dan database terpusat di server dan dapat diakses langsung dari desa. Website desa yang diterapkan di Kabupaten Bantul merupakan Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh LSM Combine, dan sudah diterapkan di Kabupaten lainnya. cara Ada pun tehnik Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tehnik analisi data yang di gunakan adalah analisis data, menemukan kesamaan dan perbedaan, melakukan pengamatan langsung, penarik sebuah kesimpulan.

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi saat ini sangat berkembang dengan pesat, seiring dengan itu masyarakat semakin cerdas dan kritis, menanggapi perkembangan dan kemajuan di suatu Negara maupun di tiap daerah, berbagai isu-isu perkembangan dan kemajuan sekarang dapat dengan cepat dan mudah menyebar keseluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui e-Government.

Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieliminir melalui pemanfaatan e-Government menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. E-Government menawarkan pelayanan publik bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. E-Government juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Mulai saat ini pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat¹.

Dilihat dari sudut pandang ini pelaksanaan otonomi daerah mempunyai potensi positif terhadap kondusifitas perbaikan sosio-ekonomi masyarakat di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Adanya kandungan aspek kontrol lokal yang tinggi akibat dari di berlakukannya proses akuntabilitas publik dalam perumusan regulasi mengonstruksi pemerintahan daerah untuk menjalankan tata peraturan yang baik (*good regulatory governance*). Akan tetapi pemerintahan daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, seperti pada masa Orde baru, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan ditingkat daerah/lokal. Karena dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan konsep yang kini sangat populer di Indonesia.

¹ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2014. Hal. 1

Dari presiden sampai pejabat kabupaten, dari politisi, akademisi sampai aktivitas LSM membicarakan *good governance*, seorang akademisi, Rohman Achwan, bahkan sangat yakin bahwa *good governance* adalah “manifesto politik” di abad ke 21. Dan ini juga sebuah cita-cita ideal pemerintahan yang hendak di tinjau di masa depan². Program ini adalah merupakan salah satu proses demokrasi yang sedang tumbuh di negara kita. Berbagai tanggapan yang diberikan oleh masyarakat, dalam menjalankan suatu program. Sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, dalam menanggapi masalah mengenai perkembangan dan kemajuan suatu Program yang di jalankan Pemerintah ke setiap desa.

Status program yang kini dijalankan pemerintahan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, melalui program pemerintahan berbasis elektronik (e-government) guna mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sebagai upaya dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi agar tidak semakin tertinggal³. Dalam hal ini sesuai dengan Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang penggunaan email resmi dalam pendistribusian resmi kedinasan di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul.

Harapan dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik tersebut dapat mendorong percepatan gerak pembangunan daerah di segala bidang dan aspek kehidupan yang strategis. Serta tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta terjalannya komunikasi dan distribusi informasi secara cepat, akurat dan akuntabel di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul. Maksud dikeluarkannya Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2011 yakni untuk mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana teknologi komunikasi yang telah dimiliki pemerintah setempat, sekaligus

² Aagn Ari Dwipayana Sutoro Eko (dkk), *Membangun Good Governance di Desa*, Ire Press Yogyakarta, 2003. hal. 1.

³ Pemkab bantul akan selenggarakan pemerintahan berbasis elektronik di [<http://kabarpolitik.com/2011/12/01/pemkab-bantul-akan-selenggarakan-pemerintahan-berbasis-elektronik/>] diaskes pada tanggal 7 oktober 2015, jam 32:35 wib.

mengembangkan wawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi”⁴.

Pemerintahan kabupaten bantul, Kota Yogyakarta dalam rangka mengwujudkan potensi sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan pengetahuan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pelaksanaa Program dan kegiatan menuju Pemerintahan Desa Berbasis Eletronik (e-Desa) di Kecamatan kasihan, di antaranya ada beberapa desa yang menjalankan program tersebut, Salah satunya desa bangunjiwo.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian dan pengamatan yang di rumuskan di dalam latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Desa dalam menjalankan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan. Kabupaten Bantul, tahun 2015?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dalam menjalankan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) di Desa Bangunjiwo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas, makapenulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Desa dalam menjalankan Program menuju pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan. Kabupaten Bantul, tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dalam menjalankan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Di Desa Bangunjiwo.

⁴Pemkab bantul akan selenggarakan pemerintahan berbasis elektroni (Setda Bantul, Mardi Ahmad, di Bantul) di[<http://kabarpolitik.com/2011/12/01/pemkab-bantul-akan-selenggarakan-pemerintahan-berbasis-elektronik/>] di , diaskes pada tanggal 7 oktober 2015, jam 32:35 wib.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan menetapkan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan Program Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dalam menjalankan Program Pemerintahan.
2. Dilihat dari studi ilmu dapat memperoleh khasana ilmu Pengetahuan pada umumnya dan ilmu Pemerintahan pada khususnya.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye di yang dikutip Subarsono yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*)".⁵

Dalam hal ini konsep tersebut juga dikemukakan Thomas Day, cangkupannya sangat luas, karena kebijakan publiknya mencangkup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Dengan demikian defenisi kebijakan publik dari Thomas Day tersebut mengandung makna bahwa⁶ (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Dari defenisi tersebut menjelaskan suatu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan

⁵ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Amlikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke 3, 2015, hal. 2

⁶ *Ibid*

bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah.

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik tersebut. seperti yang dikemukakan oleh David Easton sebagai "Penguasa" dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepu tertinggi suku, ketua adat, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat raja dan semacamnya.⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam implementasi dari pernyataan diatas maka, pernyataan tersebut adalah:

1. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam system politik modern merupakan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri dari atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang nyata-nyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan publik bisa berbentuk positif, dan bisa berbentuk negatif.

2. Implementasi Kebijakan

Penertian Implementasi Kebijakan Menurut Agustino studi implementasi suatu kajian mengenai studi kebijaknan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Secara luas Implementasi dipandang mempunyai makna pelaksanaan undang-undang, yang merupakan suatu tahap dari proses kegiatan antar berbagai aktor dimana organisasi, prosedur dan teknik saling berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalaam upaya untuk merai tujuan-tujuan kebijakan atau program. Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang merujuk pada

⁷Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013, hal. 14.

kegiatan antar aktor yang terlibat, sesuai dengan apa yang diformulasikan dalam kebijakan.

E. Defenisi Konsepsional

Defenisi konsional adalah sebagai suatu usaha untuk menjelaskan mengenai suatu pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam peneliti. Konsp ini digunakan bertujuan untuk menjelaskan sebaimana makna kata yang tertera dalam judul. Adapun batas pengertian atau defenisi konseptual dalam pembahas ini adalah:

- a. Kebijakan Publik adalah merupakan suatu tindakan yang diambil guna merespon tuntutan yang datang dari aktor kebijakan baik itu dari lingkungan yang berbeda, dimana kebijakan tersebut diformulasihkan.
- b. Implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan atau penerapan isi atau substansi keputusan melalui serangkaian aktivitas dalam rangka merealisasikan tujuan yang tertuang dalam keputusan.
- c. Program menuju pemerintahan Desa berbasis Elektronik (e-Desa) adalah pemerintahan yang menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Yang merupakan wujud peningkatan pelayanan prima kepada publik (masyarakat), menuju *good governance*.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan unsur yang penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dalam arti lain semacam acuan atau pedoman dalam pelaksanaan sebagai mestinya variabel dapat diukur.

Untuk menganalisis data penulis menggunakan teori Van Mater dan Van Horn dengan menggunakan indikator sikap pelaksanaan program, hal ini termuat dalam defenisi operasional. Adapun defenisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai

suatu kebijakan program menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang meliputi⁸:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana
4. Ciri badan
5. Perstasi kerja
6. Sikap para pelaksana

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya di lapangan.⁹

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni mengemukakan fakta yang ditemukan. Dengan demikian sesuai dengan obyek penelitian maka penelitian ini berusaha menggali untuk menemukan fakta dan memahami permasalahan yang di hadapi pada proses kebijakan implementasi Program menuju Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Sehingga akan di ketahui bagaiman proses implementasi Kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan. Dan hasil implementasi kebijakan tersebut dapat di ketahui apakah mampu memberikan dampak positif atau Negatif bagi masyarakat.

⁸ <http://dokumen.tips/law/bantul-menuju-pemerintahan-desa-berbasis-elektronik-e-desa.html> di akses pada 1 Desember 2015 jam...07:30 wib.

⁹Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada university press, Yogyakarta, 1995, hal. 64.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa Bangunjiwo adalah salah satu dari beberapa desayang menerima bantuan tersebut, yang ada dikecamatan Kasihan yang telah menerima bantuan Program menuju Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) yang yang kini suda berjalan. Dan selain itu Program yang jalankan Pemerintah Kabupaten Bantul menuju Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), tentunya di Desa Bangunjiwo mengalami masalah dan hambatan dalam menjalankan Progam Desa Berbasis Elektronik (e-Desa).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian, khususnya diperoleh dari Pemerintahan dan masyarakat Desa Bangunjiwo.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur, media masa, buku-buku, arsip-arsip, internet, dan berbagai dukumen yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan.

4. Unit Analisa Data

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisisnya adalah:

- a. Pemerintahan dan masyarakat Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, Yang meakukan pelaksanaan Program e-Desa.
- b. Kebijakan Pemerintahan dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK sebagai penyelenggara pelaksanaan program e-Desa. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 tahun 2007 tetang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Telematika Kabupaten Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi ataupun keterangan yang lebih jelas tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah Implementasi kebijakan pelaksanaan program menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), di Desa Bangunjiwo Kabupaten Bantul, yang di tujukan kepada Kepala Desa, dan bersama kawor Programnya Desa Bangunjiwo, serta dengan pihak Kepala Ka. Kantor Pengelolah Data Telematika (KPDT), selaku pihak penyelenggara dalam pelaksanaan e-Desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen dokumen atau catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk sebagai bahan literature yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

c. Observasi

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah: “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar”.¹⁰

Dalam penelitian ini, Teknik analisa data yang di gunakan adalah analisa kualitatif. Di mana data yang di peroleh diklasifikasikan, di gambarkan dengan kalimat, dipisahkan dengan mengategorikan untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya

¹⁰Lexy Moleong. *Metodelogi penelitian kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 103.

menganalisa dengan gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta runtut menilai makna yang bersifat menyeluruh.

Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumen resmi dan sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian. Langkah-langka yang perlu ditempuh dalam analisa data adalah sebagai berikut:

1. Analisa data dalam bentuk menjalin proses pengamatan dengan penelitian dilapangan.
2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan dengan gejala-gejala sosial yang diamati.
3. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap perilaku yang berkaitan dengan proposisi-proposisi teoritis sementara.
4. Mengevaluasi proposisi-proposisi sementara untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Dari beberapa langkah-langkah yang seperti di jelaskan di atas, akan di ambil satu kesimpulan yang dapat teruji kebenarnya, sehingga dapat diketahui hubungan sebab-sebab dan akibat dari beberapa data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

F. Implementasi Kebijakan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) Di Desa Bangunjiwo.

Sebagai salah satu Program pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). kebijakan yang direalisasikan pemerintahan kabupaten Bantul adalah Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa).

Program yang merupakan untuk mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana teknologi komunikasi, yang telah dimiliki Pemerintah, dalam mengembangkan wawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, serta mendorong percepatan gerak pembangunan daerah di segala bidang dan aspek kehidupan.

Tentunya dalam pelaksanaan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Tentunya pemerintahan kabupaten bantul tidak sepenuhnya berjalan sendiri, pemerintahan kabupaten juga berkerjasama dengan beberapa Instansi, yang tentunya berkaitan dengan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-desa).

Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) adalah Pemerintahan Desa berbasis Elektronik dimana seluruh kegiatan untuk mempercepat pelayanan atas kebutuhan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) merupakan wujud peningkatan pelayanan prima kepada publik (masyarakat), e-Desa sebagai salah satu upaya menuju “Bantul Cyber City”. Yang mana program ini dapat di realisasikan di pemerintahan Kabupaten Bantul, sejak 2013.

Ka. Kantor Pengelolaan Data Telematika (KPDT) di Kabupaten Bantul, sedangkan dapat di terapkan/direalisasikan ke pemerintahan Desa, sekitar Pada tahun 2014. Untuk Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) yang merupakan gerakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan ke sistem pemerintahan yang lebih baik.

1. Tujuan dan Sasaran

bahwa tujuan dan sasaran program e- Desa secara umum adalah Dengan mempermudah pelayanan yang ada di Desa. Adapun tujuan dan sasaran yang terdapat di pelaksanaan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-desa), yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada Publik (masyarakat)
2. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,
3. Terjalannya komunikasi dan distribusi informasi secara cepat, akurat dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Untuk memudahkan pelayanan di Instansi Pemerintahan, dan memudahkan aparat pemerintahan dalam berkeja, baik itu dipemerintah kabupaten, camat maupun dipemerintahan desa.
5. Menfasilitasi sarana dan prasarana desa dan sistem informasi desa (SID).

b. Sasaran

1. Kepada Masyarakat dan instansi pemerintahan daerah.
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul beserta unit pelaksana teknisnya masing-masing maupun BUMD Kab. Bantul.
3. Semua pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dan instansi Pemerintahan tingkat Desa.
4. Kepada Masyarakat dan instansi pemerintahan daerah.
5. Kepemerintahan Desa dan Masyarakat

2. Aktivitas/Kegiatan

Tabel 3.2 Aktivitas/Kegiatan

Yang Mendukung Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa)

No	Aktivitas/Kegiatan	Bentuk Kegiatan
1	Administrasi Perkantoran	✓ Menyediakan peralatan kerja kantor. ✓ Menyediakan atau mempersiapkan teknisi dalam perbaikan elektronik, mengenai perlengkapan/peralatan kerja kantor.
2	Program Pengembangan TIK dan Media Massa	✓ Kegiatan pembinaan dan pelatihan pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). ✓ Pembinaan dan pelatihan pengembangan sumber daya dan informasi.
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur Pemerintahan Desa	✓ Menyediakan atau mengaktifkan akses jaringan internet dan interanet yang cukup. ✓ Meningkatkan fasilitas elektronik, seperti komputer dan beberapa fasilitas yang lainnya.

Dari beberapa kegiatan di atas bahwa dalam rangka mendukung program pemerinth kabupaten bantul. Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) untuk menuju *e-governance*, yang di lalui beberapa perkerjaan yaitu:

1. Pembangunan Ifrastruktur Jaringan Komputer di setiap pemerintahan desa.
2. Penyedian Bandwidth DTH
3. Pemeliharaan Jaringan kumputer
4. Penyediaan aplikasi perangkat lunak Sistem Informasi Desa (SID), yang selama ini berkeja sama dengan SLM yang dikembangkan oleh Combine Resource Institution (CRI) Yogyakarta.
5. Fasilitas peningkatan SDM Aperatur desa di bidang Tik
6. Fasilitas Worehose penguatan kometmen untuk kepala Desa dalam rangka pemanfaatan TIK, untuk pelayanan di pemerinta desa.
7. Fasilitas Subdomein Desa untuk ke seluruhnya.

Berdasarkan data dan peneamatan di lapangan bahwa dalam Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana teknologi komunikasi, yang telah dimiliki Pemerintah dan mengembangkan wawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang berorien-tasi pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah pada pemembentuk dan membangun etos kerja para penyelenggara pemerintahan daerah, yang tanggap terhadap dinamika pembangunan masyarakat yang kian cepat dan dinamis. Hal ini di lakuakn pemerintah kabupaten Bantul dalam kontes menuju pemerintahan *e-Government*.

3. Implementasi Kebijakan

a. Tahap Penerapan pelaksanaan Program Menuju Pemerintah Desa Berbasis Elektronik (e-Desa)

Dalam pelaksanaan untuk mensukseskan program e-desa dari pemerintah kabupatern bantul, Pemerintah Desa Bangunjiwo melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program menuju pemerintahan desa berbasis elektronik (e-Desa). e-Desa merupakan salah satu wujud dari program Pemerintah Kabupaten Bantul dalam peningkatan pelayanan prima kepada publik (masyarakat). Dalam pelaksanaan Program dalam pemanfaatnya dan kegunaannya yang dirasakan oleh pihak pemerintah untuk saat ini baru secara outcamnya, di antaranya sebagai berikut¹¹:

1. Manfaat dan keuntungan dari Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Untuk pemerintahan kabupaten sendiri, dalam Manfaat dan keuntungan dari Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Untuk saat ini belum begitu nyata kelihatan, karna baru tahap awal dalam melaksanakan, baru secara outcomenya. Ini yang dirasakan pihak pemerintahan kabupaten bantul sendiri.dan selain itu ada data dan informasi yang digunakan kadang belum konsisten serta kurangnya sistem informasi data yang baik.

¹¹Pedoman umum Program Menuju Pemerintahaan Desa Berbasis elektronik (e-Desa) dari kantor KPDT kepada penulis, melalui wawancara, Ka. Seksi Aplikasi telematik oleh Ibu Kawumimingrum, ST, M. CS. Pada hari selasa tanggal 16 febuari 2016.

2. Tapi untuk pemerintahan desa sendiri yang melaksanakan Iplementasi Sistem Informasi Desa (SID) ini, merasakan pelayannya itu lebih mudah, efektif, efisien dan akuntabel.

Selain Manfaat dari Program menuju Pemeerintah desa Berbasis Elektronik (e-Desa) di laksanakan pemerintahan kabupaten, bagi Pemerintahan Desa dan kelurahan dalaam penerapan SID di anataranya sebagai berikut¹²:

1. Manfaat Sitem Sistem Informasi Desa dan Kelurahan

- a. Sebagai media publikasi penyebarluasan informasi potensi desa dan kelurahan secara terbuka kepada masyarakat.
- b. Melayani keperluan masyarakat dalam hal pembuatan surat-surat keterangan secara cepat, hemat waktu dan hemat anggaran melalui layanan online.
- c. Menyampaikan aspirasi, permasalahan dan hasil pelaksanaan pembangunan kepada Pemerintah dengan cepat.
- d. Memudahkan investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi sesuai dengan leading sektornya.
- e. Memasarkan usaha masyarakat melalui konten Iklan Desa/Kelurahan dengan terarah dan mudah diakses oleh semua kalangan.
- f. Menambah pendapatan melalui pengembangan menu Iklan Desa dan Kelurahan.

Sebagai Media studi banding satu sama lain antara desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

2. Manfaat bagi Pemerintahan Daerah /Pusat

- a. Mengetahui informasi terkini yang diupdate oleh Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

¹² <https://www.facebook.com/forumfasilitatoraceh/posts/343777509135013> di akses pada pada 21 Maret 2016. Jam 15:30 wib

- b. Sarana pelengkap evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan dari waktu ke waktu.
- c. Dapat menyerap dan menindaklanjuti dengan segera hal-hal penting yang diaspirasikan oleh pemerintah desa dan kelurahan.
- d. Sarana pembanding dan pemantauan kemajuan desa-desa dan kelurahan-kelurahan di seluruh Indonesia.
- e. Sebagai perbendaharaan data yang dapat menjadi bahan kajian untuk menentukan kebijakan program pembangunan selanjutnya.

3. Manfaat bagi tanggung jawab sosial (CSR) Perusahaan

- a. Dengan mudah dapat melihat dan memilah data riil terkini dan mengkaji permasalahan sosial, pendidikan, kesehatan, Ekonomi , lingkungan hidup dan pembangunan yang ada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
- b. Menindaklanjuti data dan permasalahan desa dan kelurahan yang tersaji sesuai dengan ruang lingkup CSR perusahaan.
- c. Memudahkan program bantuan pengembangan CSR bagi desa dan kelurahan berdasarkan kajian dan permasalahan yang sesungguhnya sebagai amanat dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas.

4. Manfaat bagi pengusaha

- a. Dapat dengan cepat menemukan dan mengarahkan potensi yang layak dikembangkan menjadi peluang usaha dan investasi sesuai minat dan kemampuannya.
- b. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan melalui pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuannya.

5. Manfaat bagi masyarakat

- a. Dapat mengakses layanan online di Desa dan Kelurahan dalam membuat surat-surat keterangan yang dibutuhkan.
 - b. Dapat memasarkan produknya pada menu Iklan Desa/kelurahan.
 - c. Dapat diketahui dengan cepat hasil usaha atau produksinya oleh semua kalangan.
 - d. Dapat menyerap data informasi potensi desa dan kelurahan sebagai bahan pelengkap kajian penelitian, riset dan prospek pembangunan.
- b. Tahapan Sosialisasi Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) di Desa Bangunjiwo.

Dalam hal ini tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan beberapa instansi yang terkait dalam pelaksanaan, tentang Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), bertujuan untuk memberi tahu bagaimana berpartisipasi dalam program, dan mengenai kegiatan dan manfaat dari Program.

b. Ketentuan yang menjalankan kebijakan Pelaksanaan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa)

Dalam hal pemerintahan desa Bangunjiwo sendiri dalam menjalankan kebijakan program Pemerintahan Kabupaten Bantul. Yang mana Program Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), yang menjalankan atau melaksanakan kebijakan Program pemerintah kabupaten adalah kelurahan Desa Bangunjiwo dan masyarakatnya. Tetapi mengenai kebijakan yang menjalankan program ini, secara keseluruhan baru sampai di pemerintahan Desa, belum secara keseluruhan di karena pemerintahan Desa juga belum melakukan sosialisasi secara bersekelah atau sudah terprogram oleh Desa.

c. Landas Hukum/Ketentuan Pedoman Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektroni (e-Desa)

Berdasarkan hasil wawancara lapangan dan data dari KPDT yang disampaikan kepada penulis bahwa ketentuan Pedoman dalam pengambilan keputusan suatu

Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) yang menjadi acuan/ landasan pedoman yaitu¹³:

1. Peraturan Daerah (Perda), nomor 17 tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Telematika Kabupaten Bantul.

Seadangkann dalam peresedurnya regulasinya pengembangan TIK berdasarkan yaitu:

1. Surat Edaran Bupati pemanfaatan dan penggunaan Software legal (OSS);
2. Instruksi Bupati No 3 Tahun 2011 tentang penggunaan e-mail Resmi Dinas Pemerintahan Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
4. Peraturan Bupati No 72 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Pemerintah Kabupaten Bantul.

d. Teknik Infomasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggara Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa)

Ka. Kantor Pengelolah Data Telematika (KPDT). Dimana KPDT menggelar workshop “Membangun Bantul Cerdas Melalui Pemberdayaan Masyarakat Mandiri IT (Information Technology)” bagi kepala SKPD se-Kabupaten Bantul, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun Sarana dan Prasana baik berupa jaringan internet dan sistem informasi sebagai bagian dari memajukan masyarakat Bantul. TIK saat ini menjadi unsur penting dalam pembangunan dalam hal ini mendukung usaha ekonomi kreatif yang ada di wilayah daerah Bantul.

¹³Pedoman umum Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis elektronik (e-Desa) dari Kantor KPDT kepada penulis, melalui wawancara, Ka. Seksi Aplikasi telematik oleh Ibu Kawumimingrum, ST, M. CS. Pada hari rabu tanggal 16 Desember 2016.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan kemudian dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan; (1) Pada tahap proses pelaksanaan Program Program Pemerintahan Kabupaten Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten. ke Pemerintahan tingkat Desa yang dilaksanakan di Desa Bangunjiwo ini sepenuhnya sudah berjalan dengan baik, mulai dari proses tahap untuk penentuan sebuah kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan komitmen dan memastikan dari kesiapan Desa Bangunjiwo sendiri yang menjalankan kebijakan program, sampai ketahap mensosialisasikan program di ruang lingkup Pemerintah Desa, hingga ke tahapan mensosialisasikan ke masyarakat, mengenai Program e-Desa serta proses dalam pelaksanaannya dan sudah berjanjucukup baik.; (2) Belum begitu maksimal terlekasikan terhadap masyarakat, hal ini karena keterbatasan pengetahuan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat kurang, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan dalam penerapannya program di bidang TIK. Dimana Penerapan program Menuju pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang sistem Teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis elektronik, di antaranya:

- a. Dalam pemanfaatan dari Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Mengenai peningkatan pelayanan prima kepada publik, dalam Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana teknologi komunikasi, sudah mulai berjalan dengan baik dari tahap ketap sudah memperlihatkan adanya hasil dari penerapan Sistem Informasi Desa (SID).
- b. Dari segi Pelayanan yang ada di Desa Bangunjiwo, sudah berorientasi pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah pada pembentukan dan membangun etos kerja para penyelenggara pemerintahan daerah, tingkat Desa sangat di tanggapinya terhadap dinamika pembangunan masyarakat yang kian cepat dan dinamis.
- c. Selain itu pemerintahan desa Bangunjiwo sendiri juga yang melaksanakan Implementasi Program e-Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) walau

pun belum begitu maksimal. Tapi pemerintahan Desa Bangunjiwo merasakan manfaat dan e gunaaannya, terutama yang di rasakan pemerintahan sendiri merasakan pelayanan itu lebih mudah efektif, efisien dan akuntabel. Bisa dikatakan pelaksanaan dari Program di Desa Bangunjiwo sudah terlaksanakan dengan baik, terutama diruang lingkup kanntor Deasa Bangunjiwo.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Bisa dilihat Pendukung dari Karakteristik Agen Pelaksana program menuju pemerintahan desa berbasis elektronik (e-Desa), ini di karenakan adanya komitmen dari pelaksana Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), dimana dukungan ini berasal dari Desa sendiri dengan adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana juga berpengaruh terhadap pengimplementasian sebuah program. Kemudian dari Sumberdaya, Dengan adanya ketersediananya sarana prasarana yang tersidia dalam mendukung program e-Desa. Untuk menunjang peningkatan pengetahuan SDM-nya bidang TIK, dan tersedianya kafisitas Kumputer yang di sediakan di tempat pelatihan bimbingan TIK sekitar 15 unit komputer.

Faktor Penghambat dari e-Desa, Sikap kecenderungan (*disposition*) pelaksana Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) dalam hal ini dari hambatan pelaksana Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) sendiri yang pertama berasal dari peserta pelaksana dari Desa sendiri, dan masyarakatnya, di antara lain, Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang Teknologi Informas idan Komunikasi (TIK), maka perlu di tingkatkan lagi pengetahuan bidanga sistim informasi, dengan melakukan bimbingan pengembangan TIK untuk tingkat Desa, Belum begitu optimalnya dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komuniaksi (TIK) yang akan disediakan di pemerintahan Desa, kepada pelayanan publik (Masyarakat), Belum terwujudnya konsep manajemen pemberdayaan masyarakat desa yang terstruktur dan sistemik sebagai pedoman bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, dan Belum optimalnya penerapan e-government.

DAFTAR PUSTAKA

- Agstino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwipayana, Ari Aagn. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Ire Press Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press Ikapi,
- Fredrich, Carl. Dalam Solikhin Abdul Wahab, 1977. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hoogerwert, 1983. *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta.
- Moleong Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada university press, Yogyakarta.
- Nugroho, Riannt. 2003. *Furmulasi. Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Agus Erwan, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media.
- Sugiono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bamdung: Alfabeta,
- Subarsono, 2015. *Analisis Kebijakan Publik Kosep, Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit ombak
- Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakasaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Pyblik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wibawa, Samudera. 1991. *Kebijakan Publik dan Analisa, Intermedia*. Jakarta.

Sumber lain

<http://dokumen.tips/law/bantul-menuju-pemerintahan-desa-berbasis-elektronik-e-desa.html> di akses pada 1 Desember 2015.

[<http://kabarpolitik.com/2011/12/01/pemkab-bantul-akan-selenggarakan-pemerintahan-berbasis-elektronik/>] di akses pada tanggal 7 oktober 2015,.

<http://www.semukan.com/2014/12/pengertian-basis-data-database.html> di akses pada tanggal 29 november 2015.

<https://1nuy4s4.wordpress.com/pengertian-jaringan-komputer/> di akses pada tanggal 29 november 2015.

<http://www.combine.or.id/2015/02/seluruh-desa-di-bantul-akan-lebih-transparan-dan-partisipatif/> di akses pada 14 Maret 2016.